

Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Secara Global

Seno Sudarmono Hadi
Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika & Komputer BSI Jakarta
Jl. RS. Fatmawati No. 24 Pondok Labu Jakarta
seno.ssh@bsi.ac.id

Abstract – Indonesia's economic growth is so rapid at the end of this end result in the inflation rate. As happened in the last six years was recorded inflation increases quite dramatically from the year 2009 of 2.78 to 5.50 in the year 2014, despite declines in terjadi flktuasi rising inflation. Inflation is the impact of terjadinya increase perekonomian growing on a country by increasing the economic growth of trading activities or buying and selling increased as the supply increases of businesses or producers resulting in an increase of more than buyers or consumers to shop, resulting in price increases of some good product ata goods market services. One way to anticipate the growing inflationary policy, the government is supposed to do parties with Binga rate policy in this regard should be made the monetary authorities in Indonesia, Bank Indonesia. With interest rate policy is expected minimal rate of inflation can be prevented to a lower level so that people can enjoy the products at a more affordable price so that the prosperity of the people can be achieved.

Keywords: Interest Rates, Inflation, Economic Growth

I. PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan sering kita jumpai pada hampir semua negara adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kecenderungan harga yang cenderung mengalami kenaikan terus menerus, secara umum dan terjadi dalam waktu yang lama atau terus- menerus. Jika terjadi kenaikan harga hanya terjadi pada berbagai barang tidak bisa disebut sebagai inflasi, tetapi jika kenaikan harga hampir terjadi pada semua barang yang diperjual belikan dimasyarakat dan terjadi pada kurun waktu yang cukup lama baru keadaan tersebut disebut inflasi.

Salah satu hal untuk mengantisipasi inflasi yang berkelanjutan atau hyper inflasi adalah kebijakan tingkat suku bunga yaitu menaikkan tingkat suku bunga pada saat terjadi inflasi. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank Sentral, maka akan direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk memanfaatkan moment tersebut guna meningkatkan produksi dan menanamkan investasinya. Seiring dengan itu, akan berdampak juga pada jumlah produksi yang bertambah dan tenaga kerja yang juga akan semakin bertambah. Akibatnya ekspor bertambah dan jumlah pengangguran menurun, sehingga devisa yang masuk ke negara tersebut semakin menguatkan dollar terhadap mata uanglain. Demikian pula sebaliknya, bila saja suku bunga menurun, produksi industri akan berkurang karena produsen akan membatasi kerugian. Apabila jumlah produksi berkurang, maka akan melemahkan mata uang tersebut.

Kenaikan suku bunga sangatlah dikhawatirkan oleh para kreditur dan tingkat penjualan perumahan yang semakin menurun karena membuat pajak pinjaman modal dan kredit perumahan semakin meningkat,

tanpa didukung dalam kelancaran produksi dan bisnis yang menunjang akan berimbas. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam menaikkan dan menurunkan suku bunga yang semuanya harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dalam negeri Dampak ekonomi dari sebuah perubahan tingkat suku bunganya diantaranya akan berpengaruh terhadap:

1. GDP (Gross Domestik Product)

Sebagai indikator tingkat kesehatan atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. GDP merupakan indeks utama sistem akun nasional (*Sistem of National Accounts - SNA*) yang dikarakteristik oleh hasil final dari kesatuan aktifitas program perekonomian, penduduk, dan pengukuran biaya barang dan jasa, yang diproduksi kesatuan untuk penggunaan akhir. GDP adalah indeks utama, yang menunjukkan kondisi ekonomi nasional. GDP adalah indikator produk manufaktur, yang berjumlah pada biaya produksi bersifat final terhadap barang dan jasa. Ini berarti, biaya barang dan jasa lanjutan, yang digunakan dalam produksi (seperti barang mentah, bahan-bahan, bahan bakar, bibit, makanan ternak, layanan pengangkutan udara, harga grosir, layanan komersil dan finansial, dll) tidak termasuk dalam GDP. Jika tidak, GDP akan mengandung akun berulang. Selain itu, GDP adalah produk domestik, karena diproduksi oleh penduduk. Penduduk adalah kesatuan ekonomi (usaha maupun rumah tangga), dengan mengabaikan indentitas nasional dan kewarganegaraannya, yang memiliki suku bunga ekonomi dalam wilayah ekonomi negara.

2. Kredit Untuk Kepemilikan Perumahan Rakyat

Pengadaan perumahan merupakan bagian terpenting

dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia, pentingnya data ini terletak pada kemampuannya untuk memicu perubahan kondisi perekonomian, memprediksi perubahan tingkat pertumbuhan. Turunnya jumlah unit perumahan yang baru dapat memperlambat perekonomian dan mendorong ke arah resesi. Sebaliknya, peningkatan pada jumlah unit perumahan yang baru dapat mengindikasikan adanya tumbuhnya perekonomian dalam suatu negara

3. Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*)

Dampak yang harus diperhatikan dalam kebijakan naik-turunnya tingkat suku bunga apakah semakin meningkatkan peluang usaha dan peluang kerja atau malah justru meningkatkan pengangguran dan PHK dan perlu diketahui, pengangguran dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga hanya sedikit yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja.

Disisi lain, suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh pihak bank atau peminjam lainnya untuk memanfaatkan uang selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga itu merupakan balas jasa yang akan diterima kemudian atas pengorbanan yang dilakukan atau kata lain suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau sebagai sewa penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu.

Pada prinsipnya suku bunga adalah harga atau penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu, yang mengumumkan dalam 'persentase'. Setiap masyarakat (atau investor) yang melakukan interaksi dengan bank, baik interaksi dalam bentuk simpanan, maupun pinjaman (kredit), akan selalu terkait dan dikenakan dengan yang namanya bunga. Bagi masyarakat (atau investor) yang menanamkan dananya pada bank, baik itu simpanan tabungan, deposito dan giro akan diberikan suku bunga simpanan (dalam bentuk %). Suku bunga ini merupakan rangsangan dari bank agar masyarakat mau menanamkan dananya pada bank. Semakin tinggi suku bunga simpanan, maka masyarakat akan semakin giat untuk menanamkan dananya pada bank, dikarenakan harapan mereka untuk memperoleh keuntungan. Dan begitu sebaliknya, semakin rendah suku bunga simpanan, maka minat masyarakat atau investor dalam menabung akan berkurang sebab masyarakat berpandangan tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh di masa yang akan datang dari bunga adalah sangat kecil.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK

telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP*), yaitu :

- a. Kelompok Bahan Makanan
- b. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
- c. Kelompok Perumahan
- d. Kelompok Sandang
- e. Kelompok Kesehatan
- f. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
- g. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan Inflasi, Kebijakan Fiskal dan Moneter, serta Peran BI dalam menanggulangi terjadinya inflasi yang bersumber pada buku kepustakaan, brosur dan internet.

III. PEMBAHASAN

Pengertian Bank menurut Kasmir, (2008:135) mengatakan bahwa bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Suku bunga merupakan salah satu faktor yang cukup menarik bagi pemilik dana untuk menyimpan

uangnya pada suatu bank. Tingkat suku bunga yang diberikan hendaknya dapat bersaing dengan tingkat suku bunga yang diberikan bank lain. Tingkat suku bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah yang dipinjamkan dan dengan dasar tahunan (annual basis/perannum).

Menurut Kasmir, (2008:136), dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

1. Bunga Simpanan

Adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh: jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contoh bunga kredit. Suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah peminjam (debitur).

Agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Menurut Kasmir (2008:137-140), faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.

2. Target Laba yang diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Karena jika diinginkan laba usaha meningkat maka pihak perbankan akan menaikkan tingkat suku bunganya.

3. Kualitas Jaminan

Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan

(mudah dicairkan) yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

4. Kebijakan Pemerintah

Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan atau pagu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia

5. Jangka Waktu

Faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif rendah.

6. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil.

7. Produk yang Kompetitif

Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

8. Hubungan Baik

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

9. Persaingan

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman, harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil.

10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafide, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya

terhadap bank, bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Begitu pun sebaliknya.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (*Base Money*) sebagai sasaran kebijakan moneter.

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking*, artinya perubahan *stance* kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (*BI Rate*) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi *output* dan inflasi.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan *aggregat* (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (*shocks*) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok *volatile food* dan *administered prices* yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK.

Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (*shocks*) yang sangat besar seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM di tahun 2005 dan 2008 sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi.

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (*shocks*) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.

Dalam tataran teknis, koordinasi antara pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan departemen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran

inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013 – 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi $\pm 1\%$.

Sasaran inflasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan tersebut melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu (*anchor*) pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan

Adapun Tabel Inflasi dari Periode Juli 2015 sampai dengan Februari 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Inflasi Periode Juli 2015- Februari 2017

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Februari 2017	3.83 %
Januari 2017	3.49 %
Desember 2016	3.02 %
Nopember 2016	3.58 %
Oktober 2016	3.31 %
September 2016	3.07 %
Agustus 2016	2.79 %
Juli 2016	3.21 %
Juni 2016	3.45 %
Mei 2016	3.33 %
April 2016	3.60 %
Maret 2016	4.45 %
Februari 2016	4.42 %
Januari 2016	4.14 %
Desember 2015	3.35 %
Nopember 2015	4.89 %
Oktober 2015	6.25 %
September 2015	6.83 %
Agustus 2015	7.18 %
Juli 2015	7.26 %

Sumber: BPS (2017)

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia.

Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*). Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Menurut Hartojo Wignyowiyoto mengemukakan adanya faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga antara lain:

1. Persepsi Masyarakat Tentang Waktu (*Time Frame Preference*)

Semakin banyak masyarakat percaya akan hari esok maka akan semakin rendah tingkat suku bunga, sebaliknya semakin tidak percayanya akan adanya hari esok, maka tingkat suku bunga akan semakin tinggi

2. Pengaruh Teknologi Terhadap Inflasi

Semakin luas penggunaan teknologi semakin efisien cara kerja masyarakat dan harga akan menjadi lebih rendah dan suku bunga menjadi turun

3. Unsur Keterdesakan Waktu Mendapatkan Dana

Dalam situasi pelunasan uang tunai mendadak, maka dana yang ditawarkan suku bunganya akan semakin tinggi

4. Dana Masyarakat

Dalam situasi dana yang sangat langka sementara permintaan pasar naik, maka kemungkinan tingkat suku bunga bank cenderung akan mengalami

Menurut Hartojo Wignyowiyoto mengemukakan adanya faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga antara lain

1. Persepsi Masyarakat Tentang Waktu (*Time Frame Preference*)

Semakin banyak masyarakat percaya akan hari esok maka akan semakin rendah tingkat suku bunga, sebaliknya semakin tidak percayanya akan adanya hari esok, maka tingkat suku bunga akan semakin tinggi

2. Pengaruh Teknologi Terhadap Inflasi

Semakin luas penggunaan teknologi semakin efisien cara kerja masyarakat dan harga akan menjadi lebih rendah dan suku bunga menjadi turun

3. Unsur Keterdesakan Waktu Mendapatkan Dana

Dalam Situasi pelunasan uang tunai mendadak, maka dana yang ditawarkan suku bunganya akan semakin tinggi

4. Dana Masyarakat

Dalam situasi dana yang sangat langka sementara permintaan pasar naik, maka kemungkinan suku bunga cenderung akan mengalami kenaikan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingginya suku bunga adalah:

1. Adanya Inflasi

Suku bunga terkait dengan harga barang dan tinggi rendahnya Inflasi, sebab suku bunga rendah maka JUB akan bertambah dan kreditpun murah. Sehingga tidak mungkin suku bunga akan turun jika tingkat inflasi tinggi.

2. Otoritas Moneter

Dunia usaha sebaiknya mengalahkan otoritas moneter. Dengan membandingkan suku bunga tinggi sebagai sumber ketidakmampuan mereka dipasar internasional dengan suku bunga yang berlaku

3. Korupsi Dan Kolusi

Dengan adanya korupsi maka jumlah uang yang didapat akan digunakan untuk dibelanjakan pada waktu dekat, timbulnya korupsi dan kolusi disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pasar terutama pengusaha yang baru yang belum memiliki pengalaman memasuki bisnis

4. Tingkat Urbanisasi

Proses urbanisasi yang pesat mendorong inflasi yang menyebabkan suku bunga yang meningkat, karena para urban tidak dibarengi prasarana yang memungkinkan membuat barang karena banyak permintaan akan kredit bank

5. Penggunaan Kapasitas Produksi Yang Optimal

Di Indonesia penggunaan kapasitas produksi baru sepertiga, dari kapasitas yang seharusnya namun kapasitas yang menganggur harus tetap dibiayai, selain itu rendahnya dalam berorganisasi mengakibatkan jabatan ketua lebih banyak diduduki dari pelaku lapangan yang mengatur lebih banyak dari yang bekerja

6. Ketidak Efisienan Dunia Usaha

Tingkat suku bunga yang tinggi oleh sektor riil dari pada sektor moneter, sehingga mengakibatkan tingkat suku bunga terus merangkak ketinggian yang lebih besar

Akibat tingginya suku bunga berdampak pada masalah perekonomian sebagai berikut:

1. Dana asing masuk untuk mendapatkan tingkat keuntungan
2. Menghambat perekonomian nasional sebab tingginya suku bunga, maka peklaku bisnis enggan mengajukan kredit ke bank dan pada akhirnya kegiatan perekonomian menjadi lesu.
3. Kesulitan dalam mengembangkan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi pengusaha sulit mendapatkan dana dengan agunan yang lebih besar

Dampak terhadap perekonomian akibat dari suku bunga yang rendah adalah:

1. Negara akan terjadi penurunan pendapatannya
2. Muncul adanya inflasi

Suatu kenaikan dalam tingkat penawaran uang akan menciptakan kenaikan penawaran uang pada tingkat mula-mula, Individu akan mencoba mengurangi saldo uang pada tingkat bunga mula mula, sementara individu dapat mengurangi uang dalam portofolio

Masyarakat sebagai suatu keseluruhan harus memegang penawaran uang yang dinaikkan. Uang itu ada sehingga seseorang harus memegangnya, Kalau perlu transaksi tidak mengharapkan untuk memegang penawaran uang yang dinaikkan itu pada tingkat bunga yang ada untuk membentuk keseimbangan Individu mencoba untuk mengurangi saldo uang mereka dengan menggunakan uang untuk membeli assets finansial, barang konsumsi serta investasi. Jika suatu obligasi memberikan uang pada pemiliknya setiap tahunnya, karena hasil obligasi turun, maka tingkat bunga juga mengalami penurunan.

Kebijakan Moneter menurut Iswardono SP (1995:3), memiliki tujuan paling utama adalah:

1. Masyarakat menginginkan antara barang dan jasa yang diprimistikoduksi sama dengan kapasitas produksinya. Dengan perkataan lain “ *Actual GNP Should Equal Potential GNP*” baik untuk tenaga kerja, capital dan tanah seharusnya diolah para entrepreneur untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting terhadap sumbangannya terhadap pendapatan, sehingga pencapaian tingkat GNP yang tinggi sehingga secara dapat mencerminkan rendahnya tingkat angka pengangguran
2. “ *A Stable Price On at Least a Constant and Pradictable rate of Inflation*” ada suatu kepercayaan. Suatu yang diperkirakan tidak akan t bakal akan terjadi memberikan dampak pada misallocation sumber daya ekonomi, demikian juga dengan laju inflasi yang tidak akan berdampak pada perekonomian tetapi juga akan memiliki dampak pada bidang social dan juga bidang politik.

3. *A Light Rate of Growth of Output* yang dapat dicapai melalui efisiensi atau penghematan. Pada dasarnya perluasan efisiensi terjadi dikarenakan meningkatnya tingkat tabungan masyarakat serta para investor mendapatkan hasil yang sangat tinggi.

Pengangguran yang terjadi dijelaskan oleh teori klasik dengan adanya ketegaran dalam suatu perekonomian khususnya ketegaran upah dan immobilitas buruh yang akan berdampak pada ketegaran yang akan dapat memberikan jaminan bekerjanya fungsi ekonomi secara otomatis untuk menuju *full employment* (FE).

Permasalahan yang terjadi pembuatan kebijakan tentang kesalahan ketegaran upah dan immobilitas buruh.

Pada tahun 1930 teori moneter lebih dikaitkan pada harga dari pada tingkat pendayagunaan yang secara luas tidak mampu membuat kebijakan. Penekanan harga oleh para ahli monetaris terhadap masuknya output dan tenaga kerja .

Alternatif lain adalah tentang pengangguran persisten yang menjurus dengan identifikasi beberapa karakteristik khusus dari suatu perekonomian yang akan menjaga pencapaian FE secara otomatis bahkan jika upah dan harga sangat fleksibel dan menekankan pada peranan ketidak-tentuan dan pengharapan pada suatu perekonomian dan masalah akibat informasi.

Keynes mencoba membentuk teori tentang output dan tenaga kerja yang akan menganalisis perilaku pada saat ini dalam pengaruh perubahan ide tentang masa yang akan mendatang

Uang memiliki peranan yang penting karena uang merupakan *substel device* untuk menghubungkan saat ini dan masa yang akan datang

Menurut Keynes dalam suatu perekonomian yang tidak seimbang (*Disequilibrium*) memungkinkan para pembuat transaksi yang pesimistik dapat berlaku sebagaimana mereka tidak dapat berusaha untuk membeli output dimana perekonomian mampu untuk memproduksi dan tidak ada suatu tingkat harga dan upah yang fleksibel dapat membiarkan perilaku ini, dengan kata lain penurunan tingkat upah tidak akan mencapai *full employment* (FE) sehingga diperkirakan bahwa hanya dengan rangsangan eksternal terhadap permintaan dapat dan mampu menghilangkan pengangguran misal.

Jalur kebijakan moneter antara jumlah uang tingkat pendapatan nasional atau perubahan tingkat JUB akan dapat mempengaruhi perubahan tingkat pendapatan nasional Bukrti secara empiris bahwa jalur kebijakan moneter yang dapat dipergunakan antara lain suku bunga, pagu dari kredit atau pinjaman serta kekayaan yang dimiliki masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Fenomena keadaan suku bunga yang tinggi secara bertahap mulai menurun ini sangat diharapkan banyak pihak, karena tingkat suku bunga yang tinggi di Indonesia saat ini sangat sulit dicari jalan keluarnya karena menyangkut berbagai aspek kegiatan perekonomian pada bidang-bidang lainnya. Kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan situasi terbaik banyak diutarakan banyak ahli, tetapi solusi yang ditawarkan banyak pro dan kontra.

Adapun solusi yang disarankan berhubungan dengan tingginya tingkat suku bunga adalah:

1. Penurunan tingkat suku bunga
2. Perbaikan dalam sistem moneter dan riil secara berkesinambungan
3. Menahan laju inflasi
4. Menanggulangi korupsi dan kolusi

Kita semua berharap serta berkeinginan agar kegiatan perekonomian Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tingkat bunga yang beranjak turun secara stabil dapat memperlancar transaksi perekonomian di Indonesia. Sebenarnya kenaikan suku bunga dari suatu sisi baik untuk menyerap dana dari luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai sumber dana untuk melakukan investasi.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijaksanaan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi secara makro yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas tingkat harga barang sangat tinggi, stabilitas tingkat harga kebutuhan sehari-hari serta pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran.

Sasaran itu akan tercapai secara maksimal dan serempak atau dengan kata lain kebijakan moneter diharapkan dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang cukup rendah serta tumbuhnya serta tercapainya tingkat keseimbangan neraca pembayaran yang cukup mantap.

REFERENSI

- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro (Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2)*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Iswardono SP .1995 *Kapita Selekta Ekonomi Moneter*. Jakarta:Gunadarma
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Cetakan 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nasution, Mulia.1998. *Ekonomi Moneter Uang Dan Bank*. Jakarta: Djambatan

Nopirin. Ekonomi .2008. Moneter. Yogyakarta:
BPFE UGM.

Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Wijaya, Faried dan Hadiwigeno.1992. Soetatwo.
Ekonomi Moneter Dan Perbankan. Yogyakarta:
BPFE UGM.

PROFIL PENULIS

Lahir Di Sleman Yogyakarta Tanggal 04 Januari
1968, Alumni Strata Satu FE Jurusan Manajemen
Perusahaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Starata Dua Program Magister Manajemen
Universitas Gunadarma Jakarta. Staff Akademik
Atau Dosen Tetap AMIK Bina Sarana Informatika (
AMIK BSI) Jakarta Sejak Tahun 1999

Mengajar Di Beberapa perguruan Tinggi Di Jakarta
diantaranya FE Universitas Gunadarma, AMIK BSI
Jakarta Dan STMIK Nusa Mandiri Jakarta.